

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah jenis kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan tertentu .Dalam istilah ekonomi , sektor publik mengacu pada organisasi yang operasinya terkait dengan upaya untuk menyediakan komoditas dan layanan publik untuk memenuhi keinginan dan hak masyarakat umum .Sebagai layanan publik ,akuntan sektor publik mencoba menjawab kebutuhan publik .

Berdasarkan pengertian diatas, akuntansi sektor publik adalah kegiatan yang memiliki manfaat dengan bentuk sebuah usaha yang dapat menghasilkan baik barang a maupun jasa atau pelayanan.

Di sektor publik, pemeriksaan merupakan jantung dari proses memperoleh akuntabilitas publik. Di sektor publik, khususnya di bidang pemerintahan, ada tiga macam ujian:

- a. Adanya audit keuangan dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tahunan yang disajikan adalah benar atau wajar , sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atas dasar akuntansi komprehensif di luar Indonesia atau prinsip akuntansi umum yang diterapkan di Indonesia.

- b. Penilaian kinerja adalah jenis evaluasi manajemen keuangan yang biasanya mencakup pemeriksaan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (nilai uang). Pemeriksaan ekonomi dilakukan untuk menentukan apakah biaya input yang digunakan dalam operasi adalah minimum atau tidak. Gagasan pemeriksaan efisiensi digunakan untuk melihat apakah jumlah produksi terbesar dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Gagasan pemeriksaan efektivitas digunakan untuk menentukan apakah layanan atau layanan organisasi yang ditawarkan atau diterima sesuai.
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Pada dasarnya , akuntansi sektor publik adalah mekanisme bagi pemerintah dan masyarakat umum untuk berbagi informasi .Menurut *American Accounting Association* , tujuan akuntansi untuk perusahaan sektor publik adalah sebagai berikut:⁷

- a. *Accountability*, yang akan menawarkan informasi kepada manajer sektor publik untuk melaporkan akuntabilitas bidang , divisi, dan sumber daya di bawah pengawasan mereka.
- b. *Management Control*, untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen operasi organisasi yang akurat ,

efisien, dan hemat biaya serta penggunaan sumber daya yang dialokasikan.

Manfaat adanya informasi akuntansi bagi sektor publik adalah dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkhusus dalam melakukan alokasi sumber daya, menentukan biaya suatu program baik secara ekonomis maupun teknis. Pemerintah dapat menggunakan informasi akuntansi dalam menentukan biaya pelayanan terhadap pihak publik, menentukan biaya standar dan juga harga yang akan ditunjukkan kepada pihak publik.

Akuntansi sektor publik berhubungan dengan 3 prinsip utama, yaitu penyedia informasi, manajemen, dan akuntabilitas. Data akuntansi digunakan untuk membuat keputusan, yang membantu manajer dalam tugas mereka mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Data akuntansi juga digunakan untuk menentukan biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu, serta kelayakan ekonomi dan teknologinya. Data ini juga dapat digunakan untuk menentukan inisiatif mana yang paling sesuai, berhasil, dan hemat biaya saat menilai investasi. Data akuntansi juga penting untuk mengevaluasi kinerja sektor publik.

B. Konsep Penilaian Kinerja

Kinerja merupakan kemampuan untuk mengelola informasi dalam pengambilan keputusan agar tercapainya sebuah keberhasilan. Penilaian atau pengukuran kinerja dapat dikatakan sebagai monitoring

dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengukuran kinerja hal yang harus ditekankan terletak pada input (jenis program yang dijalankan), output (layanan atau produk yang dihasilkan), dan outcome (hasil dan dampak dari layanan atau produk yang dihasilkan).

Penilaian kinerja termasuk aspek terpenting dalam sistem pengendalian sebuah organisasi.⁶ Adanya sistem penilaian kinerja dalam sektor publik dimaksudkan agar membantu untuk menilai pencapaian yang telah didapat melalui tolak ukur baik finansial maupun nonfinansial. Sistem penilaian kinerja juga dapat digunakan sebagai alat dalam pengendalian sebuah organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas penilaian kinerja merupakan proses menentukan tercapai tidaknya organisasi sektor publik dalam melaksanakan tujuan tertentu.

Tujuan melakukan evaluasi kinerja sektor publik adalah untuk mencapai tiga tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja pemerintah melalui fokus pada maksud dan tujuan unit kerja dan program .
- b. Mengalokasikan sumber daya dalam membuat keputusan
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

⁶ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009). hal 123

Proses penilaian kinerja sektor publik agar dapat mengetahui tingkat capaian kinerja adalah jika teridentifikasinya variabel kunci dikembangkan menjadi indikator kinerja yang dibandingkan dengan kinerja atau standar kinerja yang telah ditentukan.

Beberapa hal yang diperlukan dalam menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan dan pengendalian. Umumnya meliputi proses, prosedur, dan struktur yang menjadi tanggungan apakah organisasi telah dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi atau belum.
2. Spesifikasi teknis dan standadisasi. Bertujuan untuk memberikan tanggungan spesifikai tersebut dapat dijadikan sebagai standar penilaian.
3. Profesionalisme dan keahlian teknis .Tujuannya adalah untuk menetapkan akuntabilitas untuk memenuhi kriteria teknis dan standarisasi yang ditentukan.
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Keduanya berkaitan dengan pengakuan dan penggunaan sumber daya.
5. Mekanisme sumber daya manusia. Bertujuan agar dapat memberkan motifasi kepada anggota sektor publik dalam memperbaiki kinerja personal ataupun organisasi.

C. Konsep Nilai Uang (*Value For Money*)

Layak untuk Uang adalah ide kunci dalam organisasi sektor publik, di mana Nilai untuk Uang mengacu pada pemahaman tentang nilai uang. Yang dimaksud dengan “Value for Money” adalah evaluasi atau pengukuran kinerja organisasi pemerintah berdasarkan input, output, dan hasil. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas adalah dua jenis indikator nilai untuk uang (efektivitas).⁷

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan *Value for money* atau konsep nilai uang adalah bentuk pengevaluasian organisasi sektor publik berdasarkan pemasukan, pengeluaran dan outcome yang telah dijalankan.

Value for money dikatakan sebagai pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, antara lain:

Ekonomi

Hubungan antara pasar dan input dikenal sebagai ekonomi (biaya input). Ekonomi alternatif dapat didefinisikan sebagai proses memperoleh barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga yang layak terendah, atau perbandingan input dengan nilai unit moneter. Dikatakan pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan tanpa pemborosan jika dibarengi dengan ukuran ekonomis. Jika upaya

⁷ Ibid, hal. 4

operasional dapat menghilangkan atau meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu, hal tersebut dianggap efektif dari segi biaya.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input value}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Target anggaran belanja

Input Value : Realisasi anggaran belanja

Efisiensi

Konsep efisiensi dan produktivitas saling terkait erat. Juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian sumber daya ekonomi. Rasio output terhadap biaya dapat digunakan untuk menentukan efisiensi. Efisiensi mengacu pada mendapatkan hasil maksimal dari serangkaian input yang diberikan atau mendapatkan hasil maksimal dari serangkaian input yang terbatas. Efisiensi sebagai alat untuk membandingkan output/input dengan tujuan atau target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Realisasi anggaran belanja

Input : Realisasi anggaran pendapatan

Efektifitas

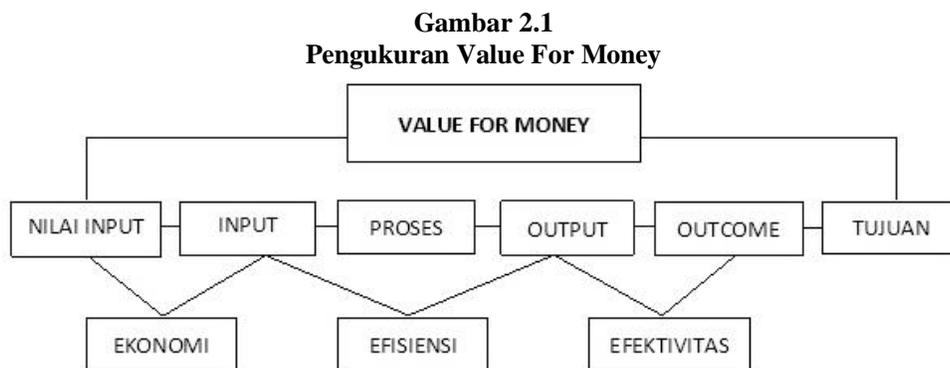
Pada dasarnya efektivitas memiliki hubungan dengan pencapaian tujuan atau target yang sudah ditentukan. Efektivitas dapat dikatakan sebagai hubungan antara keluaran dengan tujuan atau target yang harus dicapai. Sebuah kegiatan dapat dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan yang sudah ditentukan.⁸

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Realisasi anggaran pendapatan

Output : Target anggaran pendapatan



Sumber: Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2009

Input adalah sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Output adalah hasil dari pelaksanaan program atau kegiatan. Outcome adalah efek dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Organisasi sektor

⁸ Ibid, hal. 4

publik dapat dianggap telah mencapai nilai uang jika mereka menggunakan input paling murah untuk menghasilkan output terbaik untuk memenuhi tujuan organisasi tertentu.

Berikut ini adalah beberapa keuntungan menggunakan value for money di sektor publik:

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik (pelayanan yang diberikan tepat sasaran)
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- c. Mengurangi biaya pelayanan publik dengan menghilangkan inefisiensi dan mengurangi penggunaan input.
- d. Memfokuskan alokasi anggaran untuk kepentingan publik.
- e. Meningkatkan pengetahuan publik tentang dana publik

(kesadaran pengeluaran publik) sebagai landasan pelaksanaan akuntabilitas publik.⁹

⁹ Ibid, hal 7

D. Pemerintahan Desa

Pemerintah mengacu pada lembaga atau perangkat negara yang melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan, sedangkan pemerintah mengacu pada "fungsi" pemerintah. Istilah "pemerintah" dalam arti "organ" atau "alat" negara dapat dipisahkan menjadi dua kategori: pemerintah dalam arti luas, dan pemerintah dalam arti terbatas, yang secara eksklusif mengacu pada otoritas eksekutif.

Menurut UUD 1945, pemerintah terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan kementerian. Semua organ negara, termasuk DPR, dianggap pemerintah dalam arti luas (eksekutif dan legislatif). Dan jika dalam arti luas, pemerintah adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menjalankan wewenang, maka pemerintah dalam pengertian ini menjalankan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui tindakan dan pelaksanaan berbagai pilihan.

Menurut peneliti, individu yang ditunjuk untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya sesuai dengan perannya yang berbeda-beda itulah yang dimaksud dengan pemerintahan desa.¹⁰

¹⁰ Sugiman, "*Pemerintahan Desa*", Binamulia Hukum. Vol 7 No 1, 2018, hal 84

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari peraturan desa dan menyangkut Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, dengan dibantu oleh pejabat setempat seperti sekretariat desa, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis. Organisasi operasional pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa yang dibantu oleh staf sekretaris dengan jumlah maksimal terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan minimal terdiri atas 2 (dua) urusan, yakni urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.
2. Pelaksana kewilayahan merupakan pembantu kepala desa dalam ranah satuan tugas kewilayahan. Jumlah pihak tertugas ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa dan memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dijalankan oleh kepala dusun dengan tugas sebagai penyelenggara

pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pembina kemasyarakatan desa, dan pemberdaya masyarakat desa

3. Pelaksana teknis adalah pembantu kepala desa dalam melaksanakan tanggung jawab operasional, paling banyak tiga (tiga) bagian, yaitu bagian pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan, dan paling sedikit dua (dua) bagian yaitu pemerintahan dan kesejahteraan dan bagian kesejahteraan.

Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa berperan sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut beberapa fungsi kepala desa sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOT):

- a. Penyelenggara pemerintahan desa, seperti penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, peraturan desa, urusan pertanahan, mendorong ketentraman dan ketertiban, kegiatan perlindungan masyarakat, pengelolaan dan penataan kependudukan, dan pengelola wilayah;

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur desa dan pembangunan pendidikan dan kesehatan.;
- c. Tokoh masyarakat, yang bertanggung jawab menegakkan hak dan kewajiban masyarakat, serta keterlibatan masyarakat, sosial budaya, agama, dan pelaksanaan kerja.
- d. Pemberdayaan masyarakat di bidang budaya, bisnis, politik, lingkungan, keluarga, pemuda, olahraga, dan organisasi kepemudaan, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat;
- e. cerminan dari komitmen masyarakat untuk membina hubungan positif dengan lembaga masyarakat dan organisasi lainnya.

Tugas dan fungsi sekretaris desa

Tugas sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini adalah tugas sekretaris desa:

- a. Melaksanakan bidang administrasi seperti organisasi naskah, pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
- b. Pelaksana bidang umum seperti dalam penyedia prasarana perangkat desa dan kantor, fasilitator rapat, pengadministrasian perangkat dan aset desa, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Pelaksana bidang keuangan seperti mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi

penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

- d. Para perencana yang mengerjakan hal-hal seperti pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), inventarisasi data pembangunan, pemantauan dan penilaian program, dan penulisan laporan..

Tugas dan fungsi kepala urusan

Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam mengurus pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Adapun fungsi kepala urusan dalam pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- a. sebuah. Mengelola urusan administrasi, seperti organisasi naskah, administrasi surat menyurat, dan sebagainya.
- b. Mengelola urusan keuangan, seperti administrasi keuangan desa, administrasi pendapatan & belanja desa, bukti administrasi keuangan desa, administrasi pendapatan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan forum pemerintahan desa lainnya.
- c. Mengatur hal-hal di bidang perencanaan, seperti membuat peraturan pendapatan dan belanja desa (RAPBDes), membuat laporan, dan menginventarisasi data pembangunan..

Tugas dan fungsi kepala seksi

Dalam pemerintahan desa, kepala seksi merupakan pelaksana teknis. Tugas kepala seksi adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tanggung jawab operasionalnya.

Berikut ini adalah tanggung jawab kepala seksi dalam pemerintahan desa:

- a. Perangkat Desa, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, menyusun peraturan desa, masalah pertanahan, ketenteraman dan ketertiban umum, upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penempatan dan pengelolaan wilayah, serta mengumpulkan dan memelihara data profil desa.
- b. Mengembangkan infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, dan sosialisasi, serta melaksanakan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, keluarga, pemuda, olahraga, dan organisasi kepemudaan.
- c. Hak dan kewajiban masyarakat, pelibatan masyarakat, budaya masyarakat, agama, dan ketenagakerjaan semuanya dilakukan oleh pelaksana yang memberi arahan dan insentif.

Tugas dan fungsi kepala kewilayahan

Kepala daerah bertanggung jawab untuk mendukung kepala desa dengan tugas-tugas di daerahnya. Berikut ini adalah tanggung jawab kepala daerah/kepala dusun dalam pemerintahan desa:

- a. Memajukan perdamaian dan ketertiban, melaksanakan upaya konservasi masyarakat, migrasi, penataan wilayah dan pemerintahan.
- b. Memantau pelaksanaan pembangunan di daerah.
- c. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kapasitas masyarakat dan perlindungan lingkungan, lakukan pengembangan masyarakat.
- d. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk membantu pemerintah dan pembangunan berjalan lancar.

E. Keuangan Desa

1. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara finansial atau uang, serta segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. Keuangan desa, dengan demikian, meliputi semua hak dan kewajiban yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Berdasarkan pengertian di atas keuangan desa merupakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban desa dan dapat dinilai secara finansial.

Sumber keuangan desa biasanya berupa Pendapatan Asli Desa (PAD), uang pemerintah, dan temuan BUMde yang telah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rancangan rencana desa tahunan berupa angka-angka yang menunjukkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa. APBDes terdiri dari hal-hal sebagai berikut, seperti dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa¹¹

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan merupakan kegiatan mengorganisasikan dan mengarahkan suatu usaha guna dimanfaatkan secara efektif baik material maupun fasilitas yang ada agar tercapai suatu tujuan tertentu. Semua kegiatan operasional desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

¹¹ Ibid, hal. 1022

Jadi, pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan serta pertanggung jawabannya. Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terorganisir dan disiplin, berdasarkan cita-cita pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif. Dari 1 Januari hingga 31 Desember, keuangan desa dikelola dalam satu tahun anggaran.

Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah, sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Transparansi bertujuan untuk menjamin bahwa publik memiliki akses atau kebebasan untuk menerima informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, seperti kebijakan, proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, dan semua hasilnya.

Adanya keterbukaan informasi pemerintah desa kepada masyarakat dimaksudkan untuk menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan pemerintah desa yang sejalan dengan tuntutan atau preferensi rakyat. Transparansi sangat penting dalam

pemenuhan tugas pemerintah dalam rangka memenuhi amanat masyarakat. Karena pemerintah memiliki kemampuan untuk membuat semua pilihan utama yang mempengaruhi publik atau masyarakat, hal ini terjadi.

Transparansi merupakan indikator penting pemerintahan dalam melindungi uang rakyat dari adanya korupsi. Prinsip transparansi dapat diukur dengan indikator-indikator berikut:

- a. Memastikan sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses hukum publik.
- b. Menyediakan pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan layanan publik serta proses yang ada pada sektor publik.
- c. Menyediakan pelaporan dan penyebaran informasi, serta penyimpangan perilaku publik dalam kegiatan pelayanan

Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban suatu organisasi dalam mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melaksanakan akuntabilitas pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. sebuah. Sistem yang memastikan penggunaan semua sumber daya secara konsisten berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;

- b. Suatu sistem yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Bersikap jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai pendorong perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pengembangan metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Partisipasi

Semua warga negara, baik secara langsung atau melalui lembaga yang sah yang mewakili kepentingan mereka, memiliki suara dalam pengambilan keputusan

. Kebebasan berekspresi dan partisipasi adalah dasar dari partisipasi. Keterlibatan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu bentuk partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik merupakan faktor pendorong kepatuhan penyelenggara pemerintahan desa terhadap prinsip akuntabilitas.

3. Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Desa

Tujuan laporan keuangan desa adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang realisasi anggaran dan situasi keuangan di desa yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan sebelumnya atau membuat pilihan mengenai kebijakan masa depan. Kepala Desa bertanggung jawab atas pembuatan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa. Laporan realisasi anggaran desa merupakan format dari komponen laporan keuangan pemerintah desa.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang merinci realisasi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah selama satu periode waktu, berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan realisasi anggaran memberikan gambaran tentang sumber daya ekonomi pemerintah, termasuk sumber, alokasi, dan pemanfaatannya. Pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa atau kurang lebih pembiayaan dalam anggaran semuanya dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran.¹³ 12

¹² Laporan Realisasi Anggaran : Pengertian, Unsur, Manfaat dan Cara Membuatny: <https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-realisasi-anggaran/> , diakses pada 17 Maret 2022 pukul 11:30

a. Pendapatan LRA

Laporan realisasi anggaran adalah semacam penerimaan dari Bendahara Umum Daerah/Negara atau organisasi pemerintah lainnya yang menambah perimbangan anggaran setelah suatu periode anggaran berakhir dan menjadi hak pemerintah.

b. Belanja

Yang dimaksud dengan "pengeluaran" adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah/Negara. Pada dasarnya, tujuan dari elemen belanja adalah untuk menurunkan saldo anggaran pada periode anggaran berikutnya. Pembayaran seluruh transaksi dalam aktivitas belanja tidak lagi diterima oleh pemerintah.

c. Transfer

Menerima dan menyalurkan dana dari satu entitas ke entitas lain dikenal sebagai transfer. Bagi hasil dan dana perimbangan untuk suatu proyek termasuk dalam bagian transfer.

d. Pembiayaan

Segala macam transaksi pengeluaran dan penerimaan yang tidak mengubah aset suatu entitas disebut sebagai pembiayaan. Karena segala macam pendanaan harus dibayarkan dan akan diterima kembali berdasarkan jangka

waktu yang ditentukan, maka unsur pembiayaan berusaha mengisi kekosongan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti dapat memanfaatkan penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian baru, dan juga dapat digunakan untuk membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti gunakan:

Seran melakukan penelitian.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Subun Bestobe dengan menggunakan teknik Value for Money (VFM), khususnya menggunakan indikator pengukuran (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Penelitian tersebut menggunakan metode analisis data non parametrik, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ekonomi selama 5 tahun terakhir tahun berada pada kategori $>100\%$, tingkat efisiensi selama 5 tahun terakhir berada pada standar $>40\%$, rasionya di atas 100% . Rasio efektivitas menunjukkan Desa Subun Bestobe Pemerintah sudah efektif dalam mengelola keuangan desa untuk desa masyarakat. Studi ini mirip dengan studi sebelumnya yang menilai kinerja keuangan pemerintah desa menggunakan metrik nilai uang. Perbedaannya terletak pada lokasi, serta analisis data dan metode yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Liando, Saerang, Elim¹³

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2012 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan temuan yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam hal efisiensi yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, serta perbaikan dalam hal efektivitas dengan upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan masyarakat. kesejahteraan. Studi ini dan studi sebelumnya serupa karena keduanya menggunakan metrik nilai uang untuk menganalisis kesuksesan finansial. Perbedaannya terletak pada lokasi dan teknik analisis yang digunakan.

Anggrahiny, Sya'ban, dan Maharan melakukan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam memperoleh Hak Pabean atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan menggunakan prinsip Value For Money. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan temuan yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam penerimaan BPHTB di Surabaya dari tahun 2015 hingga 2019 tergolong kurang efisien. Dari tahun 2015 hingga 2019, efisiensi berada pada kisaran yang sangat tinggi. Dan khasiat tersebut menunjukkan bahwa penerimaan BPHTB di Surabaya diyakini sangat bermanfaat.

¹³ Harry Saputra Liando, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money", Jurnal EMBA.Vol. 2 No. 3, 2014

Persamaan penelitian adalah bahwa mereka berdua menggunakan metrik nilai uang dalam mengevaluasi kesuksesan finansial serta metodologi yang digunakan. Perbedaannya terletak pada lokasinya.

Setiawan, Zamaludin, dan Anurul melakukan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian value for money digunakan di Balai Penelitian Hias Tamanan Kab. Satuan Kerja Cianjur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Balithi Cianjur selama periode pengukuran kinerja 2017-2018 tergolong sangat baik, dengan menggunakan pendekatan analitik kualitatif dengan menggunakan data objektif. Dari segi tingkat ekonomi tahun 2017-2018 dapat dikatakan sangat ekonomis berdasarkan pendekatan VFM karena realisasi anggaran lebih rendah dari target saat ini. Tingkat efisiensi tahun 2017 tergolong efisien, sedangkan tingkat efisiensi tahun 2018 sangat efisien. Pada tahun 2017-2018, tingkat kemanjuran tergolong sangat efektif. Rumusnya.

Fahrozy, Sopanah, dan Nurhayati melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Malang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang mengandalkan data sekunder dari BPKAD Kota Malang. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa kinerja Pemkot Malang dari tahun 2016 hingga 2018 sebagian besar positif. Dari tahun 2016 hingga

2018, rasio ekonomi Pemkot Malang kurang dari 100%, menunjukkan hemat biaya. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018, rasio efisiensi kurang dari 100%, menunjukkan sangat efisien. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018, rasio efektifitas lebih dari 100%, menunjukkan bahwa sudah efektif. Mereka berdua menggunakan pengukuran nilai untuk uang, yang merupakan persamaan penelitian.

Machmud dan Lantowa melakukan penelitian. Dengan hasil penelitian penerapan Value for Money yang terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik di Dinas Kesehatan Bone Bolango Gorontalo, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruhnya. penerapan Value for Money (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) pada akuntabilitas publik di Dinas Kesehatan Bone Bolango Gorontalo. Akuntabilitas publik dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan efisiensi. Mereka berdua menggunakan evaluasi nilai untuk uang dalam menganalisis kinerja keuangan, yang merupakan persamaan penelitian. Perbedaannya terletak pada lokasi dan teknik analisis yang digunakan.

Sam Bayu melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Berau. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dan temuan menunjukkan bahwa rasio ekonomi dalam 6 tahun adalah rasio ekonomi, rasio efisiensi dalam 6

tahun efisien dengan fluktuasi, dan rasio efektivitas dalam 6 tahun efektif dengan variasi efektif. Mereka berdua menggunakan evaluasi nilai untuk uang dalam menganalisis kinerja keuangan, yang merupakan persamaan penelitian. Perbedaannya terletak pada lokasi dan cara analisisnya.

Wuwungan, Tinangon, dan Rondonuwu melakukan penelitian. Dengan mengkaji tiga faktor utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui fenomena bahwa sektor publik lebih memperhatikan Value for money, yang dapat dilihat sebagai input dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai efisiensi ekonomi mendapatkan hasil yang baik, dan pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Namun, khasiat keberhasilannya masih dipertanyakan. Mereka berdua menggunakan evaluasi nilai untuk uang dalam menganalisis kinerja keuangan, yang merupakan persamaan penelitian. Perbedaannya terletak pada lokasi dan teknik analisis yang digunakan.

Putra, Wirawati melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan karakteristik ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan hasil yang menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan

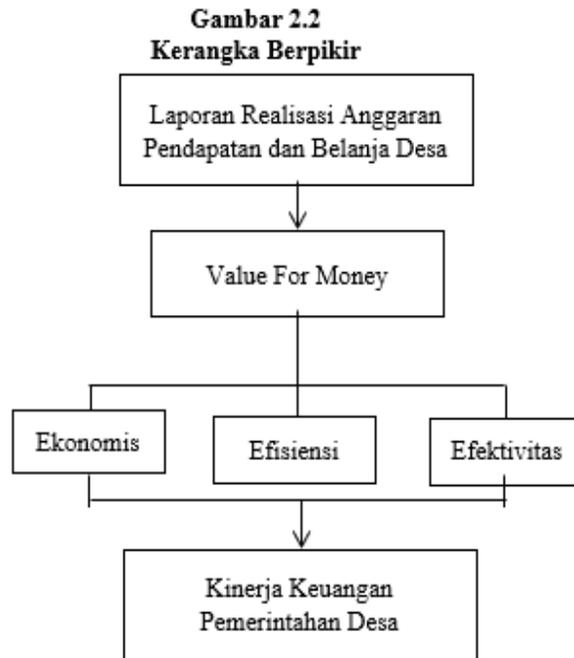
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi kriteria ekonomi, dan tergolong sangat ekonomis. Ini telah memenuhi kriteria untuk menjadi sangat efisien dalam hal efisiensi. Sementara itu, telah memenuhi persyaratan untuk menjadi sangat efektif dalam hal kemanjuran. Mereka berdua menggunakan evaluasi nilai untuk uang dalam menganalisis kinerja keuangan, yang merupakan persamaan penelitian. Perbedaannya.

Umami, Widodo melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan perlakuan akuntansi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran di Desa Gelang dengan menggunakan gagasan Value for Money. Pendekatan penelitian adalah kualitatif, dan temuan mengungkapkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Gelang telah menciptakan sistem perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang mengikuti ketentuan. Baik di Kampung Gelang maupun di tempat lain, penggunaan ide Value for Money dalam pengelolaan anggaran telah diterapkan melalui 3E (Economy, Efficiency, dan Effectiveness). Persamaan penelitian adalah bahwa keduanya menggunakan penilaian nilai untuk uang untuk menganalisis kinerja keuangan dan menerapkan pendekatan analitis yang sama. Perbedaannya terletak pada lokasi di mana ia digunakan.

Dien, Tinangon, dan Walandouw melakukan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kota Bitung berdasarkan LRA tahun anggaran 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD pada Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria total efisiensi anggaran kurang efisien karena penggunaan anggaran yang berlebihan. anggaran. Mereka berdua menggunakan evaluasi nilai untuk uang dalam menganalisis kinerja keuangan, yang merupakan persamaan penelitian. Perbedaannya terletak pada lokasi dan teknik analisis yang digunakan.

G. Kerangka Berpikir



Sumber: diolah oleh peneliti, tahun 2022

Dusun Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, memiliki rumusan masalah yang menyangkut evaluasi kinerja keuangan, seperti yang terlihat pada kerangka konseptual di atas. Berdasarkan hasil penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui berapa persentase kinerja keuangan Desa Dapurkejambon berdasarkan elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Menggunakan data berupa Laporan Realisasi APBDes untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis dan meringkas data yang telah diperoleh untuk disederhanakan dalam bentuk deskripsi sehingga lebih mudah dipahami, dan menarik kesimpulan untuk sampai pada hasil akhir.